



KOLABORASI REGIONAL DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM : STUDI KASUS PERAN AMF DI ASIA TENGGARA

Ananda Aretha Michellia^{*1}, Agussalim Burhanuddin²

^{1,2} Universitas Hasanuddin, Indonesia

Corresponding Author : anandamichelliaa23@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 02 September 2024</p> <p>Revised : 01 Oktober 2024</p> <p>Accepted : 04 November 2024</p> <p>Publication : 31 Desember 2024</p> <p>Keywords: AMF, Maritime, Transnational Crime, Maritime Security</p> <p>Kata Kunci: AMF, Maritim, Kejahatan Transnasional, Keamanan Maritim</p> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>Maritime security is an important issue that must continue to be studied along with the development of science and technology. The misuse of technology in the maritime sector makes Southeast Asia, a region dominated by water, receive threats in maritime security. This research examines the types of transnational crime, how the ASEAN Maritime Forum (AMF) plays a role in maintaining maritime security stability in ASEAN, and the factors behind the AMF's failure to be effective in ASEAN. This research uses a qualitative method by constructing the reality behind the AMF's role in maintaining maritime security stability in Southeast Asia. The results of this study show that transnational crimes in Southeast Asian waters are increasing, and the AMF has failed to realize its goal of eradicating threats to maritime security. The failure of the AMF to maintain maritime security stability in Southeast Asia is expected to be evaluated, and the implementation of existing policies is expected to be improved.</i></p> <p>Abstrak: Keamanan maritim merupakan isu penting yang harus terus dikaji seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyalahgunaan teknologi di bidang maritim membuat Asia Tenggara sebagai wilayah yang didominasi oleh perairan menerima ancaman di aspek keamanan maritim. Penelitian ini mengkaji jenis kejahatan transnasional, bagaimana Asean Maritime Forum (AMF) mengambil peran dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di ASEAN, serta faktor di balik kegagalan AMF dalam mengefektifkan kinerjanya di ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkonstruksi realita yang ada di balik peran AMF dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Asia Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan transnasional di wilayah perairan Asia Tenggara semakin meningkat dan AMF dinilai gagal dalam mewujudkan tujuannya untuk memberantas ancaman bagi keamanan maritim. Kegagalan AMF dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Asia Tenggara diharapkan dapat menjadi evaluasi dan mendapat perbaikan dalam mengeksekusi kebijakan yang ada.</p>
--	--

INTRODUCTION

Lautan merupakan wilayah yang hanya dapat dijangkau oleh manusia sebanyak 5 persen. Kompleksitasnya tersebut membuat laut memiliki dinamika yang dapat berubah dengan cepat. Karenanya, penting bagi aktor politik untuk menjaga dinamika maritim di wilayahnya untuk menghindari adanya ketegangan atau bahkan konflik di kawasan. Salah satu fungsi vital laut adalah sebagai jalur transportasi yang menghubungkan satu daratan dengan daratan lainnya. Pentingnya fungsi laut tersebut berpotensi menyebabkan tindak kejahatan terjadi di laut, salah satunya adalah tindak perompakan laut (Latusia, 2021). Pada tahun 2008, terdapat sebuah gagasan mengenai wadah bagi negara anggota ASEAN untuk mengimpun isu maritim dan mencoba menghasilkan kerja sama di antara negara anggota melalui ASEAN Political-Security Community Blueprint (APSCB). Kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2003 menghasilkan ASEAN Maritime Forum (AMF) sebagai realisasi dari APSCB yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dinamika maritim di Asia Tenggara. Namun, perlu diketahui bahwa pembicaraan mengenai keamanan maritim di ASEAN telah ada sejak Deklarasi Hanoi pada tahun 1998. Deklarasi tersebut hadir sebagai respon atas kasus pembajakan laut dan berisikan rencana untuk menyelesaikan masalah kejahatan transnasional yang saat itu berfokus pada perompakan yang dilakukan oleh bajak laut (Agastia, 2021). Menindaklanjuti adanya tindak kriminal dan sebagai langkah preventif terhadap tindak kriminal di masa depan, Indonesia menginisiasi AMF sebagai penjaga stabilitas maritim ASEAN dari ancaman yang mungkin ada. Dalam kepemimpinannya, Indonesia berperan penting dalam mengurangi interdependensi terhadap kekuatan besar dunia serta mencegah adanya intervensi dari negara non-anggota yang dikhawatirkan dapat memperkeruh suasana politik di ASEAN (Lemhannas, 2023).

Keamanan maritim merupakan isu yang penting untuk terus dikaji pada abad ke-21 ini. Kebijakan mengenai keamanan maritim dimulai setelah serangan teroris pada Menara World Trade Centre di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Semenjak tragedi tersebut, keamanan maritim menjadi isu yang penting dan dikhawatirkan persebarannya terutama terorisme maritim. Setelah itu, Amerika Serikat mendirikan kebijakan keamanan maritim yang disusul oleh The North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan kebijakan dari negara lainnya. "Keamanan maritim" dapat didefinisikan berbeda-beda tergantung dari kepentingan organisasi bahkan bias politik. Perbedaan tersebut mengacu pada ancaman apa yang dapat dimasukkan ke dalam ancaman keamanan maritim hingga respon terhadap situasi yang termasuk ke dalam isu

keamanan maritim (Tampubolon, Perwita, & Timur, 2024). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa keamanan maritim mengacu pada pengamanan akses terhadap kualitas air, penjagaan terhadap ekosistem dalam iklim yang baik, serta penjagaan terhadap stabilitas politik di wilayah sekitarnya. Pengamanan stabilitas maritim merupakan hal yang kompleks karena air dapat menjadi sumber kesejahteraan atau kesengsaraan, serta kerja sama atau konflik (Chen & Trias, 2020).

Di Asia, isu keamanan maritim telah menarik perhatian aktor politik yang dalam hal ini adalah negara. Hal ini karena letak geografis negara di Asia yang diapit oleh 2 samudera. Mengerucut pada Asia Tenggara, terdapat Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia yang ramai dilalui oleh kapal asing dengan angkutan bahan minyak mentah, gas, ataupun bahan tambang. Jalur laut Asia Tenggara merupakan jalur laut tersibuk karena sekitar sepertiga perdagangan dunia akan transit di Selat Malaka. Walaupun berpotensi meningkatkan perekonomian Asia Tenggara melalui perdagangan maritim, keamanan di Selat ini dapat diganggu stabilitasnya dengan adanya pencemaran, perompakan, dan konflik antarbangsa (Gaol, 2017). Tindak kriminal yang terjadi di perairan Asia Tenggara memberikan dampak yang signifikan pada stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Hal ini juga dapat memberikan kerugian pada keamanan laut, perekonomian, serta stabilitas secara keseluruhan di wilayah Asia Tenggara. Untuk mengatasinya, Asia Tenggara melalui ASEAN Maritime Forum (AMF) diharapkan lebih meningkatkan komitmen terhadap keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara dengan kerja sama pertahanan di wilayah laut. Berdirinya AMF didasari oleh kesadaran negara anggota ASEAN bahwa penanganan tindak kriminal di perairan Asia Tenggara merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara anggota.

ASEAN Maritime Forum (AMF) merupakan forum dialog yang membahas mengenai isu kelautan dan maritim. Pembentukan AMF disebutkan dalam ASEAN Political-Security Community Blueprint (APSCB) terutama dalam butir A.2.5 yang menekankan promosi kerja sama maritim ASEAN melalui pendirian AMF. Forum ini menerapkan pendekatan yang komprehensif dengan menekankan keselamatan navigasi dan keamanan regional yang dianggap sebagai kepentingan bersama negara anggota ASEAN (Oktavian, 2023). Meskipun menghadapi tantangan maritim yang kompleks, ASEAN berhasil membuat kemajuan yang cukup besar dalam menyelesaikan sengketa batas maritim mereka melalui AMF. Asia Tenggara digambarkan sebagai “tempat diplomasi batas laut yang sangar aktif dan inovatif” sebagaimana tercermin dalam

sejumlah perjanjian yang telah disepakati bersama (Davenport, 2013). Predikat tersebut didapatkan oleh ASEAN setelah puluhan tahun pasca Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. Saat mendirikan ASEAN, hubungan politik di kawasan ini dikelola dengan forum-forum diplomasi dan kerja sama regional daripada hukum. Lebih banyak dilakukan konsultasi dan consensus serta pernyataan deklaratif dan hanya sedikit menetapkan perjanjian yang menunjukkan kewajiban hukum yang mengikat (Chow, 2013).

Ketegangan di wilayah perairan Asia Tenggara bermula sejak terjadinya Perang Dunia II di antara tahun 1946-1949 dan pusatnya diyakini berada di wilayah Sumatera. Selain dilakukan di daratan, tindak kejahatan transasional seperti penyelundupan juga marak terjadi di laut. Satu dari sekian banyak tindak kriminal yang ada, salah satu yang marak terjadi di perairan Asia Tenggara adalah pembajakan kapal yang dilakukan oleh kelompok pembajak yang terorganisir. Insiden pembajakan oleh pelaku kriminal di laut lepas terus meningkat di Asia Tenggara sejak akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, wilayah Asia Tenggara dinilai menjadi salah satu lokasi incaran global dalam serangan pembajakan maritim terhadap kapal dagang dan kapal penangkap ikan. Tindak kriminal di laut kian berkembang seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembajakan di laut kini dilakukan dengan menggunakan senjata modern dan kapal motor cepat. Hal ini membuat tindak kriminal di laut mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat global karena semakin banyak nelayan, kapal pesiar, pengungsi, dan pelayaran komersial yang menjadi sasaran tindak kriminal ini (Karina, 2021). Banyaknya kasus tindak kriminal di laut Asia Tenggara membuat hal ini menjadi masalah yang mendesak dan membuat keamanan maritim menjadi salah satu isu strategis di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai kawasan yang didominasi oleh wilayah perairan, Asia Tenggara menjadi kawasan yang rentan atas masalah kejahatan transnasional. Pasal 100-107 United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) mengatur kerangka untuk menekan angka perompakan laut di bawah hukum internasional. Dalam lingkup ASEAN, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari ASEAN mengenai keamanan laut regional di kawasan. Karenanya, AMF masih terus mengupayakan kerja sama yang dilakukan secara komprehensif oleh negara anggota dalam menindaklanjuti tindak kejahatan transnasional di perairan Asia Tenggara. Berdirinya AMF yang juga mengkaji mengenai keamanan maritim serta dialog mengenai instrument hukum yang berkaitan dengan keamanan maritim. Namun, hasil akhir dari dialog yang dilakukan dapat

dikatakan tidak efektif melihat hanya ada 14 instrumen yang lahir dari 93 instrumen yang ada. Sangat disayangkan juga, ternyata hanya ada 4 dari 14 instrumen yang relevan dengan isu keamanan maritim (Zulhatta & Marsetio, 2022).

METHOD

Saryono (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari peristiwa yang tidak dapat diukur menggunakan metode kuantitatif (Nasution, 2023). Metode kualitatif berakar pada paradigma naturalistik-interpretatif Weberian, perspektif post-positivistik, kelompok teori kritis, serta post-modernisme. Penelitian dengan metode kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna di baliknya. Hal ini menyebabkan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif biasanya berorientasi pada proses, peristiwa, dan otentisitas. Terdapat setidaknya lima jenis metode kualitatif yang umum digunakan untuk melakukan penelitian, yaitu: observasi terlibat, analisa percakapan, analisa wacana, analisa isi, dan pengambilan data etnografis (Somantri, 2005). Pada penelitian mengenai Peran AMF dalam Menjaga Stabilitas Maritim Asia Tenggara, penulis menggunakan metode kualitatif jenis analisa isi di mana penulis akan mengkaji dokumen-dokumen berupa kategori umum dari objek yang dianalisis, dalam hal ini AMF dan perannya terhadap maritim Asia Tenggara.

Strauss dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif mengemukakan komponen penting dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif, di antaranya data dari berbagai sumber serta laporan tertulis dan verbal. Informasi yang dipaparkan dalam penelitian ini bersumber dari observasi melalui literatur yang terdapat di internet. Penulis menyusun penelitian ini dengan menggabungkan berbagai referensi seperti jurnal dan konferensi ilmiah yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan serta teori yang akan digunakan dalam penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Tindak Kriminal di Wilayah Perairan Asia Tenggara

Kawasan laut merupakan salah satu jalur yang penting yang dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara memiliki luas kurang lebih 4,5 juta kilometer persegi. Luasnya tersebut setara dengan 3% dari total luas

daratan di bumi. Dengan luasnya perairan di Asia, hal ini menjadikan Asia rumah bagi beberapa sindikat kejahatan terbesar di mana pelaku kejahatan terorganisir akan melintasi perbatasan negara dan melakukan operasi ilegal dengan menggunakan teknologi modern. Maraknya tindak kriminal yang terjadi di laut didukung oleh perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan politik terutama sejak berakhirnya Perang Dingin. Perkembangan tersebut terutama di bidang ekonomi dinilai dapat memberikan keuntungan bagi operasi yang dilakukan oleh penjahat yang berbasis di Asia (Galeotti, 2000). Sebagai contoh, tindak kriminal yang marak terjadi di perairan Asia adalah pembajakan kapal yang dilakukan oleh kelompok pembajak yang terorganisir. Dalam praktiknya, kelompok pembajak tersebut biasanya terlibat dalam penyitaan jangka Panjang dan permanen terhadap kapal berukuran sedang termasuk kapal kargo, kapal dagang, dan kapal tanker.

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengistilahkan kejahatan transnasional sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks. Sinaga (2010) menyatakan bahwa tindak kejahatannya dilakukan oleh Kumpulan organisasi yang bertujuan untuk mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di lingkungan masyarakat internasional (Sajidin, Saputra, & Nofiasari). Sejak akhir tahun 1980-an, Asia Tenggara menjadi salah satu lokasi yang diincar oleh pelaku kejahatan terorganisir dalam serangan pembajakan maritim terhadap kapal dagang dan kapal penangkap ikan. Selanjutnya, tercatat pada akhir tahun 1990-an bahwa lebih dari separuh serangan pembajakan laut di seluruh dunia bersumber dari Asia Tenggara (Warren, 2007). Dilansir dari data milik ReCAAP Annual Reports tahun 2007-2015, tercatat bahwa percobaan penyerangan bajak laut didominasi oleh penyerangan yang terjadi di perairan Indonesia dengan total 436 penyerangan dan disusul oleh penyerangan di Selat Malaka dan Singapura sebanyak 147 serangan. Maraknya tindak pembajakan kapal yang terjadi membuat pembajakan maritim dianggap sebagai permasalahan yang belum sepenuhnya memiliki solusi penyelesaiannya. Hal ini juga disebabkan oleh pesatnya perkembangan senjata dan kapal cepat. Kemajuan teknologi persenjataan ini akhirnya membuat para pelaku pembajakan maritim menjadikan kapal dagang sebagai target utama dari pembajakan yang dilakukannya. Di Asia Tenggara, lebih sering terjadi pembajakan dengan strategi *hit and run* di mana kapal yang disandera akan dibiarkan terbengkalai dan kru kapal akan dimintai uang tebusan.

Selain pembajakan laut *illegal fishing* atau pencurian ikan juga menjadi isu yang belum dapat diselesaikan di Asia Tenggara. Hal ini dilihat dari tindak pencurian ikan di Laut Natuna dilakukan oleh kapal dengan bendera negara ASEAN. Hal ini menjadi bukti bahwa ASEAN masih sebatas menjadikan upaya keamanan maritim sebagai wacana dan baru sampai di tahap perundingan tanpa adanya aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan pencurian ikan. Kenyataan bahwa negara anggota ASEAN sendiri masih menjadi aktor di balik kasus pencurian ikan membuat pelanggaran maritim yang ada di Asia Tenggara mengalami pembiaran. ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara dengan wilayah laut yang luas seharusnya bertindak tegas atas kapal-kapal berbendera negara jika terjadi pelanggaran keamanan walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh negara anggota ASEAN (Medina & Enggriyeni, 2022). Selain itu, konflik di batas laut antarnegara di ASEAN juga berpotensi menimbulkan adanya sengketa wilayah yang salah satunya terjadi di Laut China Selatan yang hingga saat ini terus bergulir dan melibatkan beberapa negara anggota ASEAN yang sama-sama mengklaim wilayah ini sebagai wilayah teritorialnya.

ASEAN Maritime Forum (AMF) Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Kriminal Maritim di Asia Tenggara

ASEAN Maritime Forum (AMF) merupakan forum yang diinisiasi oleh Indonesia untuk berkolaborasi dalam upaya menghindari konflik antaranggota dengan isu maritim sebagai fokus utamanya. Hal tersebut berkaca pada isu maritim yang kini menjaga perhatian khusus bagi negara-negara ASEAN dan dunia internasional. Publikasi data pembajakan International Maritime Bureau (IMB) menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan daerah dengan jumlah insiden pembajakan yang tinggi yaitu tercatat sebanyak 81 kasus (ICC International Maritime Bureau, 2017). Dialektika yang terjadi di dalam forum diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak dalam menjaga stabilitas maritim di Asia Tenggara. AMF dibentuk berdasarkan pertimbangan terhadap frekuensi ancaman maritim yang kini dominan bersifat eksternal atau melibatkan negara lain. Merespon tindak kriminal maritim yang terjadi di wilayah Asia Tenggara, Indonesia sebagai inisiator dari AMF berupaya dalam mendukung aksi menjaga ekologi dan sumber daya laut dengan mengusulkan pembentukan peraturan regional terkait *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* atau penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dalam pertemuan AMF keenam. Namun, pembentukan AMF perlu ditinjau kembali

mengenai efektivitasnya jika dilihat dari jumlah kasus pembajakan maritim yang terjadi pasca terbentuknya AMF.

Pembentukan AMF sebagai komitmen politik negara ASEAN ditujukan sebagai wahana untuk membahas isu maritim yang berkaitan dengan kepentingan bersama negara anggota ASEAN. AMF yang berada dalam payung ASEAN *Community* diharapkan dapat membentuk masyarakat ASEAN yang bersatu. Hal ini menjadi urgen untuk dibahas dalam AMF karena keamanan maritim telah dipandang sebagai salah satu elemen yang penting dalam gagasan ASEAN *Security Community*. Di luar kerangka AMF, dialektika mengenai keamanan maritim juga telah diadakan melalui ASEAN *Regional Forum* (ARF) yang beranggotakan lebih dari 26 negara. Sebagaimana namanya yang merupakan sebuah forum, ARF telah melaksanakan setidaknya 10 kegiatan yang sebagian besar merupakan kegiatan lokakarya dan seminar (Keliat, 2009).

Maraknya tindak kriminal khususnya pembajakan maritim di Asia Tenggara membuat kehadiran AMF diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk menekan angka pembajakan maritim dan mampu mempererat jalinan kerja sama antara negara anggota ASEAN. Dalam proses pembentukannya, AMF diharapkan mampu menjadi penyumbang nilai positif dalam memajukan kerja sama maritim di ASEAN. Pada awalnya, AMF memiliki tiga tujuan, yaitu: mendorong terbentuknya kerja sama maritim, pembengambangan pemahaman tentang isu maritim kawasan, serta menjadi upaya *confidence building measures and preventive diplomacy* (Amrullah, 2017). Seiring dengan perkembangannya, AMF akhirnya berfokus pada dua tujuan yaitu membahas isu strategis terkait kemaritiman dan penggabungan berbagai kerja sama maritim oleh badan sektoral ASEAN dan ARF. Namun perlu disayangkan ternyata angka pembajakan maritim justru meningkat pasca terbentuknya AMF. Hal ini kemudian perlu kembali dikaji terkait faktor kegagalan untuk dijadikan evaluasi dalam menangani kasus pembajakan maritim di ASEAN.

Tantangan dan Hambatan di Balik Kegagalan AMF dalam Menjaga Keamanan Maritim di Asia Tenggara

Inisiatif Indonesia untuk mendirikan AMF merupakan sebuah langkah yang diambil bahwa negara anggota ASEAN yang mayoritasnya merupakan negara kepulauan yang menguasai wilayah perairannya dan Indonesia secara formal mengundang negara anggota ASEAN untuk mengatasi masalah maritim yang ada

(Yunizar, 2023). Dengan perannya yang cukup besar dalam menjaga stabilitas keamanan maritim ASEAN, disayangkan bahwa negara anggota ASEAN tidak sepenuhnya berkomitmen pada AMF dan tidak fokus pada *output* yang dihasilkan melalui forum ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketidakpastian pada sesi AMF di masa depan. Selain itu, hanya Indonesia sebagai inisiator dan Filipina yang berkomitmen penuh pada AMF.

Laporan yang dirilis oleh Statistika Research Department mengenai pembajakan maritim tahun 2008-2019 menyatakan bahwa sejak tahun 2010, tingkat pembajakan maritim malah mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 40 kasus dan terus meningkat hingga pada puncaknya di tahun 2015 tercatat bahwa terjadi 108 kasus pembajakan maritim. Namun demikian, terdapat pula penurunan kasus pembajakan di tahun 2016 dan terus menurun hingga tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan yang tidak signifikan pada tahun 2022 (Statista, 2023). Perlu disayangkan pula bahwa pembentukan AMF tidak membuat wilayah Asia Tenggara berhenti disudutkan dengan fakta maraknya tindak pembajakan laut di perairannya. Sebagai contoh, kasus pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf yang terjadi sebanyak tiga kali terhadap pelaut dari Indonesia, Filipina, dan Kanada. Tercatat bahwa pada bulan April, Mei, dan Juni 2016, kapal Indonesia mengalami pembajakan di Laut Sulu. Motif dari pembajakan ini adalah meminta tebusan uang dengan jumlah yang besar. Namun, pemerintah Kanda justru menolak untuk membayar tebusan kepada pelaku pembajakan laut dan menyebabkan pelaut Kanada yang menjadi sanderaan kemudian dieksekusi oleh kelompok Abu Sayyaf. Hal ini membuktikan bahwa pembentukan AMF dinilai tidak efektif karena tindak pembajakan laut masih kerap terjadi pasca pembentukan AMF.

Kegagalan AMF dinilai karena tidak adanya langkah yang aktual untuk mengatasi pembajakan maritim dengan melibatkan negara anggota ASEAN. Faktanya, kerja sama multilateral dalam memberantas kejahatan maritim transnasional di kawasan sebetulnya diperlukan dan lebih efektif. Namun, perlu disayangkan bahwa ternyata kerja sama yang dilakukan secara mandiri tampaknya menjadi langkah utama bagi beberapa negara untuk memberantas tindak kriminal maritim. Hubungan kerja sama yang dilakukan secara independen tanpa membawa nama organisasi tertentu dinilai dapat memberikan peluang untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih intens dan dimungkinkan akan menjadi lebih mudah untuk melewati sengketa wilayah yang telah menghambat kerja sama multilateral. Mengacu pada rasio antara pengeluaran dengan hasil yang

didapatkan dari sumber daya alam, pencapaian ASEAN sebagai salah satu lembaga internasional kontras dengan fakta keennggan ASEAN dalam mengganggu biaya tata kelola terkait dengan kerja sama regional dan global.

Dalam skala regional, negara anggota ASEAN memberikan kontribusi sekitar sebesar \$1.400.000 pernegara setiap tahunnya dan jumlah ini naik dari yang sebelumnya \$904.000 sebelum tahun 2009. Dalam membiayai pemeliharaan sekretariat ASEAN, jelas merupakan alasan utama mengapa ASEAN tidak dapat mempekerjakan lebih banyak staf profesional untuk menjadikan ASEAN lebih berkembang menjadi pembuat agenda yang efektif. Hal ini berpengaruh pada keberhasilan ASEAN dalam mewujudkan AMF menjadi forum yang sukses memberantas tindak kriminal maritim di Asia Tenggara. Kurangnya *budget* yang dimiliki AMF menjadi salah satu faktor di balik tidak kuatnya AMF di mata negara anggota ASEAN. Faktor tersebut menjadi salah satu jawaban atas ketidakmampuan ASEAN dalam beralih menjadi utilitas multilateral. Selain mempertimbangkan biaya, faktor yang menjadi sumber kegagalan AMF dalam mewujudkan visinya adalah ketidakimbangan pengorbanan yang diberikan Indonesia dengan tingkat pencapaian yang masih rendah.

CONCLUSION

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata memberikan dampak negatif bagi keamanan maritim di Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar terdiri dari wilayah perairan yang strategis saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan di bidang maritim. Kejahatan transnasional seperti perompakan, penyelundupan, *illegal fishing*, dan sengketa batas wilayah maritim masih menjadi ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan maritim di Asia Tenggara secara signifikan. Menindaklanjuti urgensi dari pemberantasan ancaman yang ada, Indonesia yang saat itu memegang kepemimpinan ASEAN menginisiasi pembentukan AMF yang dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya kerja sama regional dalam mengatasi permasalahan maritim. AMF didirikan sebagai platform dialektika bagi negara anggota ASEAN untuk membahas berbagai isu yang menyangkut keamanan maritim, baik yang bersifat strategis maupun operasional. Forum ini menekankan pada pentingnya kerja sama regional dalam memitigasi ancaman di wilayah perairan, serta memprioritaskan keselamatan navigasi dan pencegahan konflik antarnegara.

Meskipun AMF diinisiasi dengan tujuan dan harapan yang baik, negara anggota ASEAN harus menghadapi realita di lapangan yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam efektivitasnya. Salah satu faktor di balik tidak efektifnya kinerja AMF dalam menangani masalah keamanan maritim di ASEAN adalah kurangnya partisipasi dan komitmen dari sebagian besar negara anggota ASEAN. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan dari AMF berjalan dengan lambat dan sering kali tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kejahatan maritim. Bahkan, tercatat bahwa angka tindak kriminal di laut Asia Tenggara meningkat pasca berdirinya AMF dan Asia Tenggara masih menjadi salah satu wilayah yang paling rawan terhadap serangan perompakan di laut. Selain dari perompakan, stabilitas keamanan maritim di Asia Tenggara juga diganggu dengan maraknya kasus *illegal fishing* juga menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan secara efektif di Asia Tenggara. Hingga saat ini, AMF masih menghadapi berbagai tantangan yang besar dan terus dilakukan upaya untuk menciptakan kemandirian maritim yang lebih kuat di Asia Tenggara dengan penguatan kerja sama yang lebih konkret serta komitmen yang lebih tinggi.

REFERENCES

- Agastia, I. G. (2021). MARITIME SECURITY COOPERATION WITHIN THE ASEAN INSTITUTIONAL FRAMEWORK: A GRADUAL SHIFT TOWARDS PRACTICAL COOPERATION. *Journal of ASEAN Studies*, 9(1), 26.
- Amrullah, D. Y. (2017, April 17). ASEAN MARITIME FORUM DAN SINERGI PENGUATAN KERJA SAMA MARITIM DI ASEAN. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/dara-yusilawati-amrullah/asean-maritime-forum-dan-sinergi-penguatan-kerja-sama-maritim-di-asean>
- Chen, C., & Trias, A. P. (2020). WATER SECURITY IN SOUTHEAST ASIA: REGIONAL, National, and Sub-national Challenges. Singapore: NTS Insight.
- Chow, M. E. (2013). ASEAN INTERGRATION, THE RULE OF LAW, AND INVESTMENT AGREEMENTS. *ASIL Proceedings*, 284.
- Davenport, T. (2013). ASEAN APPROACHES TO MARITIME BOUNDARY DISPUTES: WIDER IMPLICATIONS FOR ASEAN. *ASIL Proceedings*, 282.
- Galeotti, M. (2000). THE NEW WORLD OF ORGANISED CRIME. *Jane's Intelligence Review*, 51.

- Gaol, T. L. (2017). PERAN ASEAN MARITIME FORUM (AMF) DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM (STUDI KASUS PEROMPAKAN DI PERAIRAN SELAT MALAKA). *JOM FISIP*, 2.
- ICC International Maritime Bureau. (2017). *PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS*. London: ICC IMB.
- Karina, M. E. (2021). *INSTITUSIONAL, ASEAN MARITIME FORUM DALAM PENANGANAN PEMBAJAKAN MARITIM DI SEKITAR PERAIRAN INDONESIA: PERSPEKTIF LIBERALISME*. Thesis, 28.
- Keliat, M. (2009). KEAMANAN MARITIM DAN IMPLIKASI KEBIJAKANNYA BAGI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 119-120.
- Latusia, C. E. (2021). TINDAKAN PEROMPAKAN DI LAUT DALAM PERSPEKTIF ASEAN. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(8), 773.
- Lemhannas. (2023). *MENJAGA KEAMANAN MARITIM ASEAN MELALUI KEMITRAAN STRATEGIS*. Jakarta: Biro Humas Lemhannas RI.
- Medina, D., & Enggriyeni, D. (2022). PERANAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM DI KAWASAN ASEAN. *Nagari Law Review*, 222.
- Nasution, A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Oktavian, A. (2023). PENGUATAN KERJA SAMA ASEAN MARITIME FORUM (AMF) DALAM PENANGANAN KEJAHARAN LINTAS NEGARA. *JURNAL BIROKRASI & PEMERINTAHAN DAERAH*, 236.
- Sajidin, M., Saputra, I., & Nofiasari, W. (n.d.). STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASIA TENGGARA. *Jurnal Lemhannas RI*, 174.
- Somantri, G. R. (2005). MEMAHAMI METODE KUALITATIF. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 60.
- Statista. (2023). *NUMBER OF ACTUAL AND ATTEMPTED PIRACY ATTACKS IN INDONESIA FROM 2008 TO 2022*. Statista Research Department.
- Tampubolon, R., Perwita, A. A., & Timur, F. G. (2024). THE ROLE OF ASEAN IN ESTABLISHING REGIONAL MARITIME SECURITY. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 378.
- Warren, J. (2007). A TALE OF TWO CENTURIES: THE GLOBALIZATION OF MARITIME RAIDING AND PICARY IN SOUTHEAST ASIA AT THE

ENCD OF THE EIGHTEENTH AND TWENTIETH CENTURIES. A World of Water, 125-152.

- Yunizar, F. D. (2023). EFEKTIVITAS DIPLOMASI KEAMANAN MARITIM DALAM MENANGANI KASUS ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA. *Journal of Integrative International Relations*, 10.
- Zulhatta, A. I., & Marsetio. (2022). MARITIME SECURITY IN SOUTHEAST ASIA: HOW HAS ASEAN BEEN TALKING ABOUT IT SO FAR? *Andalas Journal of International Studies*, XI(2), 204.